

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS I
TPI BANDAR LAMPUNG**

*IMPLEMENTATION OF BUDGET EFFICIENCY POLICY ON THE
IMPLEMENTATION OF SUPERVISORY FUNCTIONS AT THE CLASS I
IMMIGRATION OFFICE TPI BANDAR LAMPUNG*

<https://10.0.205.137/jikk.v8i2.797>

Submitted: 03-07-2025 Reviewed: 14-07-2025 Published: 26-08-2025

Muhammad Iqbal Darmawan Ali
diqbal78@yahoo.com
Politeknik Pengayoman
Indonesia

Wisnu Widayat
wisnu@poltekim.ac.id
Politeknik Pengayoman
Indonesia

Rita Kusuma Astuti
ritakusumaastuti@gmail.com
Politeknik Pengayoman
Indonesia

Abstract. *This study aims to analyze the impact of budget efficiency policies on the implementation of supervisory functions at the Class I TPI Bandar Lampung Immigration Office. Budget efficiency as stated in Presidential Instruction Number 1 of 2025 has consequences for the performance of government agencies, especially in strategic units such as the Supervision and Intelligence Section. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection through literature studies. The results of the study indicate that budget efficiency has an impact on decreasing the intensity of field supervision and cross-agency coordination, and causes limitations in the use of facilities and infrastructure. The main obstacles include the wide scope of the work area and the lack of operational budget support. This study recommends optimizing the implementation of activities by prioritizing the urgency of the implementation of activities as a budget efficiency mitigation strategy without sacrificing the effectiveness of supervision.*

Keywords: *policy, budget efficiency, immigration supervision*

Abstract. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung.*



Efisiensi anggaran sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 membawa konsekuensi terhadap kinerja instansi pemerintah, khususnya pada unit-unit strategis seperti Seksi Pengawasan dan Intelijen Keimigrasian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi anggaran berdampak pada menurunnya intensitas pengawasan lapangan, serta menyebabkan keterbatasan dalam penggunaan sarana dan prasarana. Kendala utama mencakup luasnya cakupan wilayah kerja dan minimnya dukungan anggaran operasional. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan mementingkan urgensi dari pelaksanaan kegiatan sebagai strategi mitigasi efisiensi anggaran tanpa mengorbankan efektivitas pengawasan.

Keywords kebijakan, efisiensi anggaran, pengawasan keimigrasian

1. PENDAHULUAN

Anggaran merupakan instrumen utama dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pelaksanaan fungsi-fungsi negara (Mardiasmo, 2009). Setiap instansi pemerintah mengandalkan alokasi anggaran untuk mewujudkan program kerja dan fungsi strategis yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, perubahan kebijakan fiskal seperti efisiensi anggaran sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi efektivitas kinerja instansi publik (Habibah & Halim, 2018). Kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 menjadi upaya pemerintah dalam menjawab tekanan fiskal nasional.

Pagu Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam APBN Tahun Anggaran 2025 yang semula Rp15.962.130.370.000 (Lima Belas Triliun Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu) dipotong sebesar Rp6.340.086.000.000 (Enam Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Miliar Delapan Puluh Enam Juta) berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Terdapat sisa alokasi anggaran sejumlah Rp9.622.044.370.000 (Sembilan Triliun Enam Ratus Dua Puluh Dua Miliar Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang akan dipergunakan untuk keperluan belanja pegawai, minimum operasional, bahan makanan WBP, dan pelayanan keimigrasian. Pemotongan anggaran secara menyeluruh, termasuk di Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan,

mengakibatkan perubahan signifikan pelaksanaan tugas-tugas rutin, termasuk fungsi pengawasan keimigrasian.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung memiliki wilayah kerja yang luas dan kompleksitas tinggi dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya. Terbatasnya anggaran berpotensi menghambat pelaksanaan pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah tersebut (Nurmala et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana kebijakan efisiensi anggaran berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan di kantor imigrasi ini.

2. METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan (Sugiyono, 2024). Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk menganalisis bagaimana optimalisasi kebijakan efisiensi anggaran mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan informan serta pengumpulan dan analisis data yang diperlukan dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, laporan evaluasi kinerja instansi, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

3. RESEARCH

Mulyasa dalam Magdalena et al. (2021) implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atas tujuan yang diinginkan (Agustino, 2006). Implementasi kebijakan merupakan serangkaian kegiatan (tindakan) setelah suatu kebijakan dirumuskan. Dengan demikian tanpa adanya

suatu kegiatan implementasi, maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan menjadi sia-sia.

Mardiasmo (2009) menyebutkan bahwa efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Efisiensi juga merupakan salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam menyerap suatu anggaran. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada. Sebuah organisasi dikatakan efisien jika *output* atau hasil dapat dicapai dengan menggunakan *input* yang serendah-rendahnya atau sekecil-kecilnya (Putra & Dhiniharitsa, 2020). Maka sebaliknya, sebuah organisasi dikatakan memiliki efisiensi yang rendah apabila *input* yang dimiliki tidak dapat mencapai *output* yang diinginkan

Pengertian pengawasan dalam fungsi keimigrasian sendiri dapat dipahami sebagai sebuah proses terhadap keseluruhannya untuk mengontrol dan mengawasi apakah pada pelaksanaan pengawasannya ini telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau sebaliknya. Pengawasan Keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian (Mayang et al., 2021).

Kebijakan efisiensi anggaran atau pemotongan anggaran merupakan satu diantara langkah yang biasa diambil oleh pemerintah di beberapa negara dalam menghadapi tekanan fiskal, misalnya ketika dana untuk membiayai belanja negara semakin meningkat tetapi pendapatan negara sulit mencapai target (Habibah & Halim, 2018). Karena opsi untuk menaikkan pendapatan sulit dilakukan, maka pemerintah memilih untuk melakukan pemotongan anggaran belanja. Pada tahun 2025 ini, efisiensi anggaran belanja baik APBN dan APBD menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, hilirisasi energi, dan program lainnya yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Dhia, 2025). Penggunaan anggaran akan lebih ditujukan bagi langkah atau kegiatan yang manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat (Sinaga, 2025). Efisiensi yang ditargetkan meliputi belanja operasional dan non-operasional,

termasuk belanja perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, dan pengadaan peralatan dan mesin. Namun, efisiensi ini tidak mencakup belanja pegawai dan belanja bantuan sosial.

Kebijakan pemotongan anggaran bukan baru dilaksanakan pada tahun ini saja, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Habibah & Halim (2018) yang berjudul Analisis Dampak Pemotongan Anggaran Belanja Pada Kinerja Kementerian Pertanian, bahwa terdapat kendala yang dihadapi oleh Ditjen Tanaman Pangan dalam implementasi kebijakan pemotongan ialah adanya keterlambatan revisi anggaran dan pembayaran kontrak pekerjaan yang harus ditunda pada TA 2017. Adapun pada Badan Ketahanan Pangan, kegiatan menjadi tidak optimal karena berkurangnya frekuensi pemantauan dan pengawasan. Terkait dengan kinerja, baik pada Ditjen Tanaman Pangan maupun Badan Ketahanan Pangan, apabila memperhitungkan *self blocking*, justru membuat penyerapan anggaran menjadi lebih bagus. Pencapaian *output* sebagian besar tetap berhasil karena diperbolehkan melakukan revisi target dan tunda bayar.

Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Mentari et al. (2022) yang berjudul Analisis Dampak Pemotongan Anggaran belanja Pada Kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Riau berhasil meskipun terdampak pemotongan anggaran. Hal ini dapat terjadi karena, Perwakilan BPKP Provinsi Riau memiliki metode pelaksanaan pengawasan yaitu melaksanakan beberapa penugasan pada lokus yang sama pada waktu yang bersamaan.

Penelitian lain dilakukan oleh Pambudi & Halim (2020) yang berjudul Analisis Dampak Penundaan Dana Alokasi Umum dan Pengurangan Mandiri Dana Alokasi Khusus Pada Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul), kebijakan penundaan penyaluran DAU dan pengurangan mandiri DAK menjadi permasalahan keuangan bagi Pemkab Gunungkidul yakni mengakibatkan penurunan kemampuan Pemkab Gunungkidul untuk mendanai belanja daerah serta salah satu aspek penanganan defisit anggaran adalah pengurangan anggaran belanja. Penanganan pengurangan anggaran pada Pemkab Gunungkidul menggunakan beberapa cara antara lain dengan Gunungkidul menghitung kembali proyeksi pendapatan

baik PAD, dana Bagi Hasil dari Provinsi DIY, dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak serta memberikan instruksi kepada SKPD agar melakukan efisiensi anggaran belanja. Penerapan kebijakan efisiensi anggaran dengan tidak mengurangi layanan publik. Efisiensi anggaran pada Belanja Tidak Langsung diutamakan pada Belanja Pegawai. Perubahan pada anggaran Belanja Langsung berupa pergeseran anggaran belanja dan fokus anggaran belanja pada kegiatan prioritas.

Dari beberapa penelitian tersebut dapat diketahui bahwa penerapan kebijakan efisiensi anggaran atau dalam kata lain pemotongan anggaran pastinya memiliki dampak yang besar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada sebuah instansi. Tetapi tidak menutup kemungkinan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan lancar dengan menerapkan langkah strategis tertentu dalam pelaksanaannya untuk mencapai output sebaik-baiknya.

Menurut Jick dan Murray dalam Habibah & Halim (2018) respons pengambil keputusan dalam pemotongan anggaran pada organisasi publik dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu strategi respons internal (*internal response strategies*) dan strategi respons eksternal (*external response strategies*). Strategi respons internal merupakan strategi untuk memutuskan jenis anggaran yang dikurangi. Adapun strategi respons eksternal merupakan pilihan strategi dengan cara mencari sumber dana baru maupun menghentikan pemotongan anggaran. Jenis Keputusan respons internal terdiri atas tujuh strategi, diantaranya perencanaan prioritas secara rasional (*rational priority planning*), pemotongan politis berorientasi eksternal (*externally oriented political cuts*), pemotongan politis berorientasi internal (*internally oriented political cuts*), pemotongan secara seragam (*across-the-board cuts*), penundaan (*delay*), melepaskan kewenangan (*abdication*), dan kepasifan (*passivity*). Jenis keputusan respons eksternal juga terdiri atas tujuh strategi diantaranya argumentasi rasional (*rational argumentation*), sumber dana alternatif (*alternatives sources of funds*), ancaman politis pada eksternal (*external political threats*), janji politik pada eksternal (*external political promises*), membentuk koalisi (*coalition forming*), bergabung pada koalisi (*coalition joining*), dan pasivitas (*passivity*).

Efisiensi anggaran memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar

Lampung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, efisiensi anggaran menyebabkan kegiatan pengawasan menjadi kurang maksimal, dikarenakan wilayah kerja yang cukup luas tetapi jangka waktu dan jumlah personil dalam kegiatan pengawasan harus dikurangi. Hal demikian dikarenakan anggaran merupakan salah satu faktor kunci dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Selain itu, penerapan kebijakan efisiensi anggaran juga mengharuskan pengelolaan transportasi serta logistic yang cermat, agar tidak melebihi anggaran yang tersedia. Strategi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung untuk tetap mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan adalah dengan mengoptimalkan informasi dari Masyarakat dan hasil intelijen. Kegiatan pengawasan tetap dilaksanakan dengan memadatkan kegiatan pengawasan pada satu hari. Seperti jika biasanya untuk pelaksanaan pengawasan pada satu hari hanya tertuju pada satu wilayah kerja atau target wilayah, maka saat ini dimaksimalkan pada satu hari dapat melaksanakan kegiatan pengawasan di beberapa target wilayah.

4. KESIMPULAN

Penerapan kebijakan efisiensi anggaran atau dalam kata lain pemotongan anggaran pastinya memiliki dampak yang besar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada sebuah instansi. Tetapi tidak menutup kemungkinan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan lancar dengan menerapkan langkah strategis tertentu dalam pelaksanaannya untuk mencapai output sebaik-baiknya.

REFERENSI

- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Dhia. (2025). *Efisiensi Anggaran Tahun 2025: Strategi, Dampak dan pro Kontra*. LPM Dimensi.
- Habibah, S., & Halim, A. (2018). Analisis Dampak Pemotongan Anggaran Belanja Terhadap Kinerja Kementerian/Lembaga: Studi Pada Kementerian Pertanian. *Accounting and Business Information Journal*, 6(1).

- Magdalena, I., Krianasari, D. A., & Apsarini, S. F. (2021). Implementasi Model Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelas III SDN Sidangsari III. *Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*, 3(1).
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi 4)*. Penerbit Andi.
- Mayang, D., Panca, W., & Ambia, W. (2021). Strategi Pengawasan Keimigrasian Serta Peran Hukum Keimigrasian Dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara Di Indonesia. *Jurnal Sains Riset (JSR)*, 11(1).
- Mentari, A., Nurhidayat, Wati, S. A. R., & Zainal Umaaya. (2022). Analisis Dampak Pemotongan Anggaran Belanja Pada Kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 9(2).
- Nurmala, Paselle, E., & Zulfiani, D. (2024). Faktor Penghambat Pengawasan Izin Tinggal Terbatas Bagi Warga Negara Asing Di Kalimantan Timur Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Samarinda. *EJournal Administrasi Publik*, 12(4).
- Pambudi, N. P., & Halim, A. (2020). Analisis Dampak Penundaan Dana Alokasi Umum Dan Pengurangan Mandiri Dana Alokasi Khusus Pada Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul). *Accounting and Business Information Systems Journal*, 6(1).
- Putra, A. F., & Dhiniharitsa, N. (2020). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 9(1).
- Sinaga, N. L. (2025). *Prabowo Targetkan Efisiensi Anggaran di Tahun 2025, Ekonom: Arah Pembangunan Sesuai Prioritas Nasional*. Tempo.
- Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.